

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Yang Terhormat,

1. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Negara/Kementerian;
2. Para Sekretaris Utama pada Lembaga Pemerintah Non-Kementerian/Lembaga Non-Struktural;
3. Para Sekretaris Daerah Pemerintah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
4. Para Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

di,
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG**

**TUNJANGAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA**

Menindaklanjuti pembahasan antara LKPP dengan Kementerian PAN-RB mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai Instansi Pembina dipandang perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Juli 2013, LKPP bersama dengan Kementerian PAN-RB dan BKN telah melakukan pembahasan bersama dimana ketiga belah pihak menyepakati Kelas Jabatan (*Job Grading*) bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yakni:

No	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Madya	11
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Muda	9
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Pertama	8

2. Pada tanggal 12 Agustus 2015, Kepala LKPP telah menyampaikan kembali Usulan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri PAN-RB, dan pada prinsipnya Menteri PAN-RB telah setuju dan akan memproses lebih lanjut.
3. Mengacu kepada kedua poin sebelumnya, LKPP menghimbau agar seluruh K/L/Pemda/I mulai menganggarkan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Adapun Tunjangan Kinerja bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sudah dapat diproses pelaksanaan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

**Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah,**



AGUS PRABOWO

Dr. Agus Prabowo